

## **BAB II**

### **KEBIJAKAN LUAR NEGERI DAN EKSPOR PERSENJATAAN SWEDIA**

Kebijakan luar negeri didefinisikan sebagai sistem aktivitas di mana perilaku suatu negara mampu mempengaruhi perilaku dari negara lain serta bagaimana negara memosisikan perilakunya sesuai dengan kondisi sistem internasional (Modelski, 1962). Suatu kebijakan luar negeri dapat dikatakan sebagai sikap pemerintah negara yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan nasionalnya serta berinteraksi dengan negara lain. Hal ini menyebabkan terdapatnya variasi dalam kebijakan luar negeri di tiap-tiap negara. Oleh karena itu, bab ini akan memberikan gambaran umum mengenai dinamika kebijakan luar negeri Swedia yang terkarakteristik oleh penerapan kebijakan netral.

Di samping itu, bab ini juga akan membahas mengenai industri persenjataan Swedia. Keberadaan industri persenjataan Swedia merupakan salah satu dampak yang ditimbulkan dari penerapan kebijakan netral dalam kebijakan luar negeri Swedia. Industri persenjataan Swedia juga memiliki keterkaitan dengan terdapatnya inkonsistensi dalam kebijakan luar negeri berbasis feminisme Swedia melalui keberlangsungan praktik ekspor persenjataan.

#### **2.1 Kebijakan Netral dalam Politik Luar Negeri Swedia**

Sejak abad ke-19, dinamika politik luar negeri Swedia menunjukkan tren yang konsisten terhadap posisi netral yang diambilnya. Konsistensi Swedia terhadap prinsip netralitas dalam kebijakan luar negerinya bermula sejak abad ke-19. Sebelumnya,

Swedia merupakan kekuatan agresif yang aktif terlibat dalam konflik bersenjata bersama dengan negara-negara tetangganya. Tercatat bahwa hingga awal abad ke-19, Swedia telah terlibat dalam lebih dari tiga puluh konflik bersenjata selama kurang dari dua ratus tahun lamanya (Hetmanchuk, 2012). Namun, terjadinya Perang Napoleon yang dimulai pada tahun 1803 menjadi titik dimana Swedia mulai meninggalkan sikap agresifnya. Hal ini diakibatkan oleh kerugian yang dialami Swedia pada saat itu dengan jatuhnya sejumlah wilayah teritorial Swedia ke tangan Rusia. Kerugian teritorial tersebut menjadi awal dari dimulainya babak baru Swedia sebagai negara yang netral.

Tepatnya pada tahun 1814, Karl XIV Johan sebagai raja yang berkuasa atas Swedia pada saat itu mendeklarasikan Swedia sebagai negara yang netral. Keputusan tersebut dideklarasikan pasca lepasnya Finlandia dari Swedia serta invasi yang dilakukan Swedia terhadap Norwegia. Sejak saat itu, netralitas menjadi prinsip yang dianut oleh Swedia dalam menjalankan politik luar negerinya. Pengadopsian prinsip netralitas tersebut ditujukan untuk menjaga otonomi atas kedaulatan dan kepentingan nasional Swedia dari campur tangan eksternal (Parker, 2017).

Prinsip netralitas dalam kebijakan luar negeri Swedia diterapkan dengan tanpa mengkodifikasikannya ke dalam konstitusi maupun perjanjian internasional. Hal ini ditujukan untuk memberikan celah untuk perubahan terhadap kebijakan netral tersebut bagi pemerintah Swedia. Meskipun demikian, Swedia berhasil untuk mempertahankan posisinya sebagai negara yang netral selama lebih dari dua abad lamanya. Termasuk ketika terjadinya Perang Dunia II yang menjadi tantangan besar bagi Swedia dalam

mempertahankan kebijakan netralnya dikarenakan situasi konflik yang hampir mencapai perbatasan negaranya. Keberhasilan Swedia dalam meloloskan diri dari potensi kerugian akibat konflik bersenjata menjadi salah satu alasan yang mendorong Swedia untuk tetap mempertahankan kebijakan netralnya hingga saat ini (Modzelewski, 2019).

Pada tahun 1969, pemerintah Swedia secara resmi mendeklarasikan posisi netral Swedia dengan menyampaikan bahwa prinsip kebijakan luar negeri Swedia ialah "*alliansfrihet i fred, syftande till neutralitet i krig*" atau "*non-alignment in peace in order to remain neutral in wartime*" yang kemudian dipersingkat sebagai kebijakan netral. Melalui deklarasi tersebut, pemerintah Swedia menjadikan kemandirian sebagai nilai utama yang dibawakan dalam politik luar negeri Swedia dengan tidak mengikatkan diri pada aliansi politik maupun militer (*military non-alignment*). Hal ini menjadikan pengembangan pertahanan militer yang dapat berdiri sendiri (*self-sufficiency*) krusial dalam mempertahankan kredibilitas dari pengadopsian kebijakan netral oleh Swedia. Dalam laporan Swedish Defense Committee pada tahun 1988, dinyatakan bahwa pengadopsian kebijakan netral mengandalkan kebijakan pertahanan yang tegas dan konsisten agar Swedia dapat tetap mampu membela dirinya, termasuk di masa damai (Goldmann, 1991). Sehingga, kekuatan militer yang *self-sufficient* akan memungkinkan Swedia untuk menjaga wilayah teritorialnya dengan tanpa melibatkan dukungan militer eksternal.

Di sisi lain, dinamika politik luar negeri Swedia juga menunjukkan keterlibatan aktif Swedia di panggung internasional. Partisipasi aktif tersebut dilakukan oleh Swedia dengan tetap mempertahankan penerapan kebijakan netral. Hal ini dipengaruhi oleh Partai Sosial Demokrat Swedia (SAP) sebagai partai politik dominan di Swedia. Atas dominasi tersebut, SAP berhasil menuntun Swedia untuk menerapkan kebijakan netral yang aktif dengan mengintegrasikan ideologi “*folkhemmet*” yang dibawakannya ke dalam politik luar negeri Swedia.

“*Folkhemmet*” atau “*people’s home*” merupakan metafora yang berarti masyarakat harus dapat menyediakan keamanan bagi anggotanya sebagaimana rumah yang melindungi keluarganya. Melalui metafora tersebut, SAP menganggap pemerintah Swedia sebagai “*people’s home*” yang memiliki tanggung jawab untuk melindungi rakyatnya termasuk dari ketidakstabilan internasional yang diyakini akan dapat mempengaruhi kestabilan domestik Swedia (Agius, 2013). Sehingga, persepsi SAP atas tanggung jawab Swedia sebagai “*people’s home*” tidak terbatas pada lingkup domestik saja, tetapi juga meliputi solidaritas internasional dengan tanggung jawab yang lebih luas terhadap negara lain dan keseluruhan umat manusia. Dengan membawakan narasi tersebut, SAP membentuk prinsip kebijakan luar negeri Swedia sebagai kebijakan netral yang aktif dalam menyikapi ketidakadilan yang terjadi di luar batas negaranya (*active internationalism*) berdasarkan persepsi peran “*people’s home*” Swedia. Pengaplikasian prinsip netralitas bersamaan dengan *active internationalism* tersebut yang kemudian menjadi identitas dari Swedia sebagai negara yang netral.

## **2.2 Perkembangan Industri Persenjataan Swedia**

Perkembangan industri persenjataan Swedia merupakan salah satu dampak keberlangsungan kebijakan netral dalam politik luar negeri Swedia. Interpretasi kebijakan netral Swedia yang meletakkan kemandirian pertahanan militer sebagai suatu hal yang krusial merupakan pendorong utama terhadap pengembangan masif atas industri persenjataan nasional Swedia. Namun, industri persenjataan Swedia sejatinya telah dikembangkan sejak sebelum Swedia mendeklarasikan negaranya sebagai negara yang netral pada tahun 1814. Tepatnya pada awal abad ke-17, Swedia mulai mendirikan infrastruktur produksi persenjataan guna menyokong kebutuhan persenjataan Swedia yang pada saat itu masih merupakan negara yang agresif dan aktif terlibat dalam konflik bersenjata. Pendirian infrastruktur produksi persenjataan tersebut memungkinkan Swedia untuk dapat memproduksi meriam dan kapal angkatan lautnya sendiri melalui perusahaan Bofors dan Karlskronavarvet. Keduanya kemudian menjadi fasilitas produksi persenjataan yang semakin modern pada akhir abad ke-19.

Di masa Perang Dunia I, Swedia yang tidak mengikutsertakan pihaknya dalam peperangan mulai mengembangkan lebih jauh industri persenjataannya secara berangsur-angsur. Pengembangan tersebut didorong oleh berlakunya kebijakan netral yang menjadikan kemandirian pertahanan nasional sebagai hal yang krusial. Di samping itu, masih terdapatnya kemungkinan bagi Swedia untuk terlibat peperangan dengan kekuatan besar juga menjadi faktor yang mendorong Swedia dalam mengembangkan industri persenjataannya (Hagelin & Wallemsteen, 1992).

Berakhirnya Perang Dunia I menyebabkan banyak negara mulai mengurangi persenjataannya, termasuk Swedia dengan melakukan reduksi terhadap anggaran pengeluaran militernya atas sentimen anti-perang yang berkembang. Namun, tidak lama setelahnya, Swedia kembali meningkatkan perhatian terhadap industri persenjataannya dengan dikeluarkannya Sweden Government Decision of 1935. Melalui keputusan tersebut, pemerintah Swedia meyakini bahwa produsen persenjataan domestik serta haknya untuk mengekspor persenjataan memiliki peran penting dalam pertahanan nasional Swedia (Matz, 2022).

Ketika Perang Dunia II berlangsung, Swedia mulai menggencarkan kapasitas riset dan pengembangan atas pertahanan militernya. Pada saat itu Swedia telah dapat memproduksi pesawat jet, artileri, rudal, kapal permukaan, hingga kapal selam. Di samping itu, Swedia juga mengembangkan sistem komunikasi dan radar mereka bersamaan dengan berbagai persenjataan lainnya. Namun, kondisi pertahanan militer Swedia yang pada saat itu masih dalam proses pengembangan menjadi tantangan bagi Swedia dalam menjaga wilayah teritorialnya ketika Perang Dunia II berlangsung, khususnya di wilayah perairan Swedia. Pada saat itu, minimnya jumlah kapal perang Swedia masih belum dapat mengoptimalkan penjagaan wilayah perairan dan penegakkan posisi netral Swedia dengan terdapatnya ancaman yang ditimbulkan oleh kapal selam Uni Soviet dan Jerman (Friedner Parrat, 2022).

Terdapatnya ancaman terhadap posisi netral dan pertahanan nasional Swedia pada saat itu kemudian mendorong Swedia untuk lebih mengembangkan industri

persenjataannya di masa Perang Dingin. Terlebih, kondisi ekonomi Swedia pada masa Perang Dingin mengalami pelonjakan tinggi yang memungkinkannya untuk melakukan pengembangan industri persenjataannya dalam skala besar. Dengan ini, pemerintah Swedia mengeluarkan 1958 Defense Decision yang menekankan pada pentingnya kualitas dari persenjataan Swedia agar mencapai level setara dengan kekuatan militer dari negara-negara besar (Åselius, 2005). Keputusan tersebut juga dikenal sebagai kebijakan “Sweden First” dimana pemerintah Swedia menunjukkan keberpihakan kepada produsen persenjataan domestiknya dalam pemerolehan persenjataan.

Masa Perang Dingin juga menjadi periode dimana produsen persenjataan Swedia mulai menaruh perhatian lebih terhadap pasar asing. Baru diberikannya perhatian signifikan terhadap pasar asing oleh produsen persenjataan domestik Swedia di masa Perang Dingin disebabkan oleh bagaimana pembelian persenjataan yang dilakukan oleh pemerintah Swedia kepada produsen domestiknya belum mampu untuk mempertahankan keberlanjutan dari bisnis perusahaan-perusahaan tersebut di ranah komersial (Hagelin & Wallemsteen, 1992). Hingga tahun 1980-an, nilai total ekspor persenjataan Swedia tercatat mengalami peningkatan drastis dari sekitar lima juta Krona menjadi dua belas juta Krona di tahun 1989 (Hagelin & Wallemsteen, 1992).

Di samping itu, industri persenjataan Swedia di tahun 80-an juga menunjukkan posisi kekuatan yang baik dalam menjaga pertahanan nasionalnya. Swedia pada saat itu telah dapat secara mandiri memproduksi pesawat tempur, kapal angkatan laut, kapal

selam, artileri, kendaraan bersenjata, radar, amunisi, dan berbagai persenjataan lainnya. Swedia juga dinyatakan berada di posisi terdepan dibandingkan negara lainnya dalam mengembangkan pesawat tempur semi-otomatis *fly-by-wire* (Åkerström, 2020). Hingga saat ini, Swedia telah menjadi salah satu pemain utama dalam ekspor persenjataan dunia yang dibuktikan pada tabel berikut (Tabel 2.1):

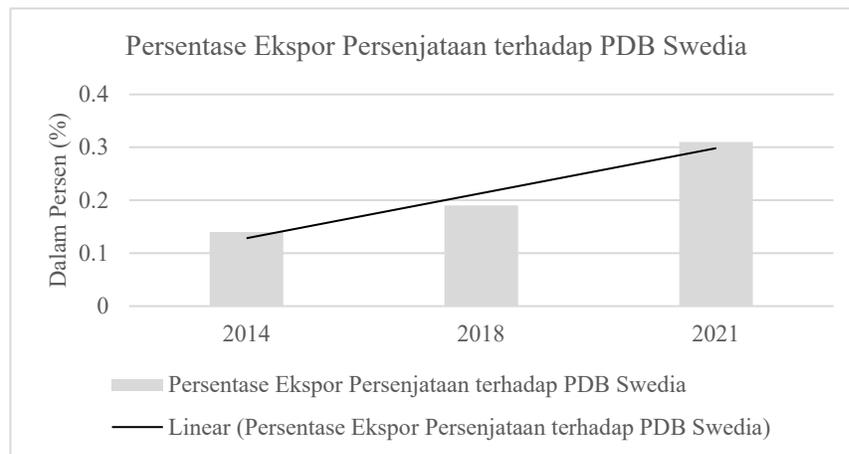
**Tabel 2. 1 Peringkat Lima Belas Besar Negara Eksportir Persenjataan Dunia Tahun 2017—2021**

Peringkat	Negara Eksportir	Pangsa Ekspor Persenjataan Global (%) (2017—2021)
1	Amerika Serikat	39
2	Rusia	19
3	Perancis	11
4	Tiongkok	4.6
5	Jerman	4.5
6	Italy	3.1
7	Inggris	2.9
8	Korea Selatan	2.8
9	Spanyol	2.5
10	Israel	2.4
11	Belanda	1.9
12	Turki	0.9
<b>13</b>	<b>Swedia</b>	<b>0.8</b>
14	Ukraina	0.7
15	Swiss	0.7

Sumber: Wezeman et al., 2022

Berdasarkan Tabel 2.1, Swedia berhasil memasuki peringkat ke-13 sebagai negara dengan pangsa ekspor persenjataan terbesar dunia pada tahun 2021. Swedia berhasil

menyumbang sekitar 0.8 persen persenjataan global dengan nilai total ekspor persenjataan yang mencapai angka 2.1 milyar dolar AS atau setara dengan sekitar 0.3% dari PDB. Nilai tersebut merupakan peningkatan dari total ekspor persenjataan Swedia pada tahun-tahun sebelumnya yang tercantum dalam gambar berikut (Gambar 2.1):



**Gambar 2. 1 Persentase Kontribusi Ekspor Persenjataan terhadap PDB Swedia Sejak 2014**

Sumber: European External Action Service, 2022

Gambar 2.1 menunjukkan tren dari nilai total ekspor persenjataan Swedia yang mengalami peningkatan selama beberapa tahun belakang. Sehingga, terlihat bahwa meskipun pertahanan Swedia sudah dapat dikatakan mumpuni pada abad ke-21 tetapi Swedia masih giat untuk melakukan ekspor persenjataan. Hal ini dibuktikan dari besarnya nilai lisensi ekspor persenjataan yang dikeluarkan oleh Swedia pada tahun 2021 yang tercantum dalam tabel berikut (Tabel 2.2):

**Tabel 2. 2 Lima Besar Negara Tujuan Pengeluaran Lisensi Ekspor Persenjataan Swedia pada Tahun 2021**

No	Negara	Nilai Lisensi (Dolar AS)	Jenis Persenjataan
1.	Uni Arab Emirat	918.2 Juta	Pesawat tempur dan mesin senjata udara
2.	Amerika Serikat	260.9 Juta	Amunisi, detonator, senjata <i>smooth-bore</i> , dan kendaraan darat
3.	India	100.9 Juta	Amunisi, detonator, dan senjata <i>smooth-bore</i>
4.	Perancis	54.2 Juta	Radar, sensor, dan senjata <i>smooth-bore</i>
5.	Inggris	22.9 Juta	Pesawat tempur, mesin senjata udara, dan senjata eksplosif

Sumber: European External Action Service, 2022

Melalui Tabel 2.2, nilai total lisensi ekspor persenjataan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Swedia pada tahun 2021 mencapai lebih dari 1.3 Milyar Dolar AS dimana mayoritas lisensi yang dikeluarkan ditujukan untuk ekspor persenjataan yang tergolong ke dalam tipe senjata *smooth-bore*.

Terkait dengan ini, aktor utama dalam industri persenjataan Swedia didominasi oleh Svenska Aeroplan AB (SAAB) yang merupakan produsen dari sekitar tujuh puluh lima persen persenjataan asal Swedia dengan fokus pada persenjataan udara (Åkerström, 2020). SAAB juga merupakan produsen dari dua persenjataan ternama Swedia, yakni pesawat tempur Gripen dan kapal selam A26, serta merupakan pemain utama di bidang sensor dan elektronik dari peperangan. Kemampuan tersebut memungkinkan SAAB untuk dapat menjalankan bisnis persenjataannya dengan jumlah kompetitor yang minim serta memberikan posisi spesial bagi SAAB untuk dapat memiliki kekuatan lebih dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah Swedia maupun politik Swedia secara umum dibandingkan dengan produsen persenjataan Swedia

lainnya.

Selain SAAB, terdapat beberapa produsen persenjataan yang juga cukup ternama dalam industri persenjataan Swedia, yakni Bofors, Hägglunds, dan Nammo. Alih-alih melakukan persaingan yang tidak sehat, relasi di antara pemain besar dalam industri persenjataan Swedia menunjukkan hubungan dengan komunikasi yang baik. Bahkan, perusahaan-perusahaan tersebut kerap melakukan kolaborasi dalam rangka produksi dan pengembangan persenjataan. Relasi sehat di antara produsen-produsen persenjataan Swedia juga ditunjukkan dengan bagaimana mayoritas dari mereka tergabung dalam asosiasi industri keamanan dan pertahanan Swedia yakni *Säkerhets och försvarsföretagen (SOFF)* sebagai kanal bagi para perusahaan untuk menghimpun dan mempromosikan kepentingan bersama yang bermanfaat bagi keamanan dan pertahanan Swedia.

Hubungan baik tersebut juga terjalin di antara produsen-produsen persenjataan Swedia dengan pemerintah Swedia. Hal ini salah satunya dibuktikan dengan keaktifan pemerintah Swedia untuk terlibat dalam negosiasi maupun promosi akan persenjataan Swedia di luar negeri bersama dengan perusahaan-perusahaan persenjataan Swedia (Britz, 2000). Kepedulian pemerintah Swedia dalam praktik ekspor persenjataan juga ditunjukkan dengan didirikannya agensi pemerintah yang secara khusus mengatur praktik ekspor persenjataan negaranya, yakni Inspectorate of Strategic Products (ISP), di bawah naungan Kementerian Luar Negeri Swedia. Sebagai agensi yang bersifat independen, ISP memiliki kewenangan untuk memberikan lisensi ekspor persenjataan

tanpa campur tangan pemerintah Swedia (Gerome, 2016). Pemberian lisensi tersebut dilakukan oleh ISP dengan melakukan penilaian risiko serta kesesuaian ekspor persenjataan yang diajukan terhadap pedoman yang berlaku. ISP juga memiliki kewenangan untuk menarik lisensi ekspor persenjataan yang telah diberikannya secara permanen maupun sementara.

Dalam mengatur praktik ekspor persenjataannya, pemerintah Swedia juga memberlakukan serangkaian regulasi hukum dimana mayoritas regulasi hukum tersebut melibatkan peran dari ISP dan menjadi pedoman bagi ISP dalam memutuskan pemberian maupun penarikan lisensi ekspor persenjataan. Regulasi mengenai ekspor persenjataan Swedia secara khusus diatur dalam Military Equipment Act dan Military Equipment Ordinance yang disahkan pada tahun 1992. Melalui regulasi tersebut, pemberian lisensi ekspor persenjataan dinyatakan hanya diperbolehkan apabila dibutuhkan untuk kebutuhan pertahanan dan keamanan Swedia serta tidak inkonsisten dengan prinsip dan objektif dari kebijakan luar negeri Swedia.

ISP juga turut memberikan pertimbangan terhadap EU's Common Position of 2008 serta UN Arms Trade Treaty (ATT) yang telah diratifikasi oleh Swedia sejak 2014 silam dalam memberikan lisensi ekspor persenjataan. Dalam penegakan EU's Common Position of 2008, Swedia bersama dengan negara-negara Uni Eropa serta negara anggota lainnya berkonsensus untuk hanya memberikan lisensi ekspor persenjataan apabila tidak inkonsisten dengan kepentingan dari kebijakan luar negeri maupun kebijakan keamanan yang tertuang dalam Regulasi Uni Eropa (Government

of Sweden, 2020). EU's Common Position of 2008 juga menyepakati delapan kriteria yang perlu dipertimbangkan oleh negara-negara Uni Eropa dalam memberikan izin ekspor persenjataan.

Delapan kriteria tersebut meliputi: kewajiban dan komitmen internasional negara anggota; hak asasi manusia; situasi domestik negara penerima; perdamaian, keamanan, dan stabilitas regional; keamanan dan pertahanan nasional negara anggota; perilaku negara penerima terhadap hukum internasional; risiko pengalihan dan ekspor kembali; serta pembangunan berkelanjutan (Government of Sweden, 2020). Sementara itu, ratifikasi Swedia terhadap ATT memberikan obligasi bagi ISP untuk memastikan lisensi ekspor persenjataan yang diberikannya tidak inkonsisten dengan embargo persenjataan maupun hukum internasional lainnya. ISP juga perlu memastikan persenjataan yang akan diberikan lisensi ekspor tersebut tidak berisiko mengancam perdamaian dan keamanan serta tidak digunakan untuk pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia maupun kejahatan transnasional.

Di samping mengacu kepada dua regulasi tersebut, pemberian lisensi ekspor persenjataan oleh ISP juga berpedoman kepada panduan nasional Swedia mengenai ekspor persenjataan dalam bentuk Government Bill. Panduan nasional tersebut menjadikan hak asasi manusia serta pembangunan berkelanjutan sebagai kunci utama dari penilaian ISP dalam memberikan lisensi ekspor persenjataan (Government of Sweden, 2020). Belakangan ini, panduan nasional tersebut mulai diperketat oleh pemerintah Swedia untuk mengantisipasi penyalahgunaan terhadap persenjataan yang

diekspornya. Pengetatan tersebut dilakukan melalui amandemen terhadap panduan nasional yang berlaku menjadi Government Bill 2017/18:23. Melalui amandemen tersebut, status demokrasi negara tujuan ekspor persenjataan turut menjadi kunci utama dari penilaian ISP bersama dengan hak asasi manusia dan pembangunan berkelanjutan.

### **2.3 Kebijakan Luar Negeri Berbasis Feminisme Swedia**

Di samping praktik ekspor persenjataan Swedia, kebijakan lain yang turut mencerminkan karakteristik kebijakan luar negeri Swedia, ialah pengadopsian kebijakan luar negeri berbasis feminisme oleh Pemerintah Swedia pada tahun 2014. Pengadopsian kebijakan luar negeri berbasis feminisme oleh Pemerintah Swedia merupakan salah satu cerminan dari karakteristik *Swedish Exceptionalism* dalam politik luar negeri Swedia. Hal ini menjadi langkah perpanjangan dari kebijakan-kebijakan pemerintah Swedia yang terkenal progresif akan kesetaraan gender sejak pasca Perang Dingin. Pada saat itu, pemerintah Swedia melakukan serangkaian reformasi kebijakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat Swedia yang memungkinkan integrasi aktif bagi kaum perempuan ke dalam ruang publik (Svensson & Gunnarsson, 2012). Salah satunya yakni dengan dihapuskannya pajak bersama serta pengadaan penitipan anak yang dibiayai oleh publik pada tahun 70-an.

Implementasi dari kebijakan luar negeri berbasis feminisme Swedia merujuk pada “feminist toolbox” yang terdiri dari tiga R, *Rights*, *Representation*, dan *Resources*. Melalui ketiga R tersebut, Swedia menjadikan kebijakan luar negeri berbasis feminismenya sebagai representasi dari gerakan global dalam upaya

pemberdayaan dan pemenuhan penuh dari hak asasi perempuan dan anak-anak di seluruh dunia (Swedish Ministry for Foreign Affairs, 2018). Di samping itu, pemerintah Swedia juga menetapkan serangkaian tujuan yang diharapkan untuk tercapai dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri berbasis feminisme. Tujuan tersebut dituangkan dalam Swedish Foreign Service Action Plan yang mencakup enam objektif jangka panjang bagi perempuan dan anak-anak: *full enjoyment of human rights; freedom from physical, psychological and sexual violence; participation in preventing and resolving conflicts, and post-conflict peacebuilding; political participation and influence in all areas of society; economic rights and empowerment; dan sexual and reproductive health and rights (SRHR)*.

Hingga pada tahun 2018, Kementerian Luar Negeri Swedia mematangkan pengimplementasian kebijakan luar negeri berbasis feminisme yang dijalankan oleh negaranya dengan menerbitkan Sweden's Feminist Foreign Policy Handbook. Di dalamnya termuat berbagai metode serta informasi mengenai pelaksanaan agenda internasional dalam rangka perwujudan kesetaraan gender serta pemenuhan hak perempuan dan anak-anak. Termasuk pengemukakan keenam objektif eksternal dari Swedish Foreign Service Action Plan sebagai harapan kontribusi Swedia dalam mengimplementasikan kebijakan luar negeri berbasis feminisme. Harapannya, Sweden's Feminist Foreign Policy Handbook akan dapat memberikan arahan serta inspirasi bagi Swedish Foreign Service dalam mengaplikasikan perspektif kesetaraan

gender terhadap pelaksanaan kebijakan luar negeri Swedia (Swedish Ministry for Foreign Affairs, 2018).

Dengan mengimplementasikan kebijakan luar negeri berbasis feminisme, Swedia menjadi pemain utama dalam agenda pengarusutamaan gender di tingkat internasional. Langkah Swedia tersebut menjadi inspirasi bagi banyak negara untuk mulai menaruh perhatian lebih dan meningkatkan pengerahan sumber daya terhadap isu kesetaraan gender. Tercatat bahwa sejumlah negara, seperti Kanada, Perancis, Meksiko, dan Spanyol, telah mengikuti jejak Swedia atau mengumumkan intensi untuk mengembangkan kebijakan luar negeri berbasis feminisme (UN Women, 2022a).

Rekam jejak kesuksesan kebijakan luar negeri berbasis feminisme Swedia salah satunya diwujudkan melalui kerja sama internasional di forum bilateral, multilateral, maupun global seperti yang tertera pada tabel berikut (Tabel 2.3):

**Tabel 2. 3 Beberapa Implementasi Kebijakan Luar Negeri Berbasis Feminisme Swedia**

Tahun	2019	2020	2020	2020	2021	2021
<b>Program / Kebijakan</b>	Joint Diplomatic Initiative bersama Pemerintah Perancis	Feminist Trade Policy	Advokasi penghapusan praktik mutilasi alat kelamin perempuan di Sudan	Joint Communiqué mengenai Konflik Yaman	“Advancing Gender Equality and Women’s Leadership in Political and Business Life in Turkey” bersama UN Women	Pendanaan Program UNFPA – UN Women on Gender Based Violence in Uganda

<b>Tujuan</b>	Eliminasi perdagangan manusia untuk eksploitasi sosial dan prostitusi	Kesetaraan pembangunan ekonomi perempuan dan laki-laki	Eliminasi praktik mutilasi alat kelamin perempuan di Sudan	Pengupayaan proses politik dan demiliterisasi di Yaman	Peningkatan partisipasi perempuan Turki di ranah kepemimpinan dan pengambilan keputusan	Bantuan dampak pandemi COVID-19 bagi perempuan dan anak-anak
---------------	---	--	--	--	---	--

Sumber: Adalia et al., 2022; France Diplomacy, 2019; Stano, 2020; Swedish International Development Cooperation Agency, 2020, 2022; Swedish Ministry for Foreign Affairs, 2019a; UN Women, 2022c

Di samping program dan kebijakan yang tercantum pada Tabel 2.4, Swedia juga turut aktif dalam dialog-dialog internasional mengenai kesetaraan gender, seperti 2019 Vienna Discussion Forum dan 2021 Generation Equality Forum. Berbagai keterlibatan Swedia dalam isu kesetaraan gender dan hak perempuan tersebut merupakan gambaran dari komitmen Swedia dalam mengimplementasikan kebijakan luar negeri berbasis feminisme.